

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN DALAM MENUNJANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Rika Kurniawaty

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Email: Rika_kurniawaty@uinmataram.ac.id

Abstrak: Perpustakaan adalah lembaga penunjang pada sebuah Perguruan Tinggi, namun mempunyai peranan penting dalam menopang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti institusinya, perpustakaan tumbuh dan berkembang secara dinamis untuk menyesuaikan tuntutan zaman. Pertumbuhan dan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi yang membawa pengaruh besar di dalam dunia pendidikan juga diakomodir di dalam standar-standar penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi. Karena itu Perpustakaan juga harus mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam proses pelayanan dan pengembangannya. Agar proses transformasi perpustakaan dapat berjalan dengan baik, maka pustakawan sebagai pengelola dan penggerak perpustakaan juga harus dapat mengembangkan kemampuannya secara konsisten. Proses pengembangan kemampuan pustakawan pada perpustakaan UIN Mataram dilakukan melalui program *Continuing Professional Development* (CPD) yang dilakukan secara bertahap. Program CPD yang telah dilaksanakan pada perpustakaan UIN Mataram adalah program Diklat CPTA (2015), Sertifikasi Pustakawan (2016), serta kegiatan Literasi Informasi dan *Online Research Skill for Academic Writing* (2017). Kegiatan CPD ini meningkatkan eksistensi, kemampuan dan keterampilan pustakawan di Perpustakaan UIN Mataram.

Kata kunci : perpustakaan, pustakawan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Continuing Professional Development*, sertifikasi pustakawan, akreditasi perguruan tinggi, *Online Research Skill for Academic Writing*.

A. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang maju dan berkembang dengan pesat memberikan pengaruh dan dampak pada segala bidang. Informasi yang dulunya hanya bisa diakses secara lokal pada saat tertentu, saat ini menjadi global dan dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Dampak dan pengaruh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut tentu saja juga berdampak pada perpustakaan.

Perpustakaan selama ini diketahui sebagai sebuah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Koleksi tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.¹ Karena itu perpustakaan mau tidak mau juga harus mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tuntutan pengelolaan perpustakaan tersebut harus dilakukan secara profesional seperti yang dinyatakan di dalam Undang-undang No. 43 tahun 2007. Dan hal ini menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi suatu kewajiban.²

Di dalam sebuah Perguruan Tinggi, perpustakaan adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Status perpustakaan di Perguruan Tinggi adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT). Walaupun begitu, perpustakaan ternyata mempunyai peran yang sangat strategis. Tugas dan fungsinya di dalam pelayanan bahan pustaka, pengolahan informasi, serta konservasi dan preservasi informasi bahan pustaka, dapat memposisikan perpustakaan menjadi unsur penunjang Tri Dharma yang sangat urgen di dalam dinamika kehidupan akademik sebuah perguruan tinggi.

Pemanfaatan TIK di perpustakaan berada pada ranah fasilitas sarana

¹ "UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.Pdf," 4, accessed July 11, 2017, http://htl.unhas.ac.id/form_peraturan/photo/094607-UU%20No.43%20tahun%202007%20tentang%20Perpustakaan.pdf.

² Haryanto Haryanto, "Peran Baru Pustakawan Dalam Implementasi Serta Penguasaan Teknologi Informasi Di Perpustakaan," *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 10, no. 1 (n.d.): 1.

dan prasarana. Fasilitas tersebut harus didukung oleh keterampilan pengelola perpustakaan agar fasilitas dapat digunakan secara maksimal. Penggunaan TIK di dalam dunia perpustakaan membuat pelayanan informasi yang ada di perpustakaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan informasi yang berbasis TIK secara maksimal dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemustaka.

Menurut Wahyu Purnomo, untuk mengembangkan pelayanan perpustakaan yang berbasis TIK, ada tiga komponen yang harus dipersiapkan, yaitu : infrastruktur, Sumber Daya Manusia, serta konten dan aplikasi.³ Komponen pertama, Infrastruktur berupa fasilitas, sarana prasarana, dan jaringan yang dibutuhkan dalam pelayanan pemustaka berbasis TIK. Komponen kedua berupa Sumber daya manusia, yaitu staf perpustakaan yang menjadi operator, pengelola system dan data, serta pustakawan yang melayani data perpustakaan berbasis TIK. Dan komponen terakhir adalah konten serta aplikasi, berupa software yang digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan, serta data yang telah diolah dengan software tertentu sehingga dapat dilayankan kepada pemustaka dengan menggunakan TIK.

B. Pustakawan dan Eksistensinya.

Namun keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan yang berbasis TIK ternyata sangat tergantung kepada kemampuan pegawai perpustakaan. Pegawai perpustakaan dan pustakawan sebagai sumber daya manusia di perpustakaan adalah kunci utama perpustakaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa perpustakaan.

Tetapi tentu saja hal ini tidak mudah, karena di dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini pustakawan banyak mengalami perubahan paradigma di dalam pekerjaannya berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

³ Wahyu Purnomo, "Pembelajaran Berbasis ICT," *Dapat Diakses Di [Http://Wahyupur. Files. Wordpress. Com200808makalah_pembelajaranberbasi Sict. Pdf](http://Wahyupur.Files.Wordpress.Com200808makalah_pembelajaranberbasi_Sict.Pdf) [Diakses 8/1/2011]*, 2008, 1, <http://physicsmaster.orgfree.com/Artikel%20&%20Jurnal/Inovasi%20Dalam%20Pendidikan/pembelajaran%20berbasis%20ICT-2.pdf>.

Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut yang sebagian besar dikarenakan pengaruh TIK membuat profesi pustakawan yang senantiasa berhubungan dengan berbagai macam informasi menjadi semakin kompleks.

Pemustaka yang dihadapi oleh para pustakawan dan staf perpustakaan saat ini digolongkan kepada *digital native*. Cendrela Habre⁴ menyatakan bahwa *digital native* adalah orang yang lahir pada saat (setelah) dikenalnya teknologi digital. Atau orang yang lahir pada dasawarsa 1980-an yang merupakan awal era digital. Terutama orang-orang yang lahir dan besar pada akhir abad ke 20. Hal ini disebabkan karena kehadiran berbagai macam peralatan teknologi yang kemudian menjadi suatu kebutuhan. Adapun ciri-ciri *digital native* menurut Habre, antara lain adalah :

1. Generasi *Digital Native* sangat menyukai teknologi.
2. Generasi ini mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada berbagai macam fasilitas berbasis teknologi, misalnya fasilitas informasi.
3. Generasi *Digital Native* ini mempunyai kemampuan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan pada suatu perangkat teknologi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan karena *capabilitas* fasilitas yang digunakan untuk bekerja secara *multitasking*.
4. Generasi *Digital Native* ini bekerja dengan lebih semangat, cenderung kepada sesuatu yang mutakhir, bekerja secara cerdas, mempunyai keinginan untuk selalu berhasil, serta senang bekerjasama (bekerja di dalam 1 tim).
5. Generasi *Digital Native* ini cenderung belajar berkelompok, dan mendiskusikan sesuatu secara lebih terbuka dan aktif.
6. Generasi *Digital Native* ini menyenangi diskusi-diskusi untuk mengembangkan materi yang diperoleh dari dosennya, membuat berbagai macam bentuk kerjasama untuk saling membagi pengetahuan yang telah didapat.

⁴ Cendrela Habre, "Impact of Digital Natives on Libraries" (University Librarian at Lebanese American University, n.d.), <http://www.slideshare.net/Cendrella1/impact-of-digital-natives-on-libraries>.

7. Generasi *Digital Native* ini menyenangi berbagai macam proses pembelajaran, baik itu berupa kuliah tatap muka maupun pembelajaran mandiri.
8. Generasi *Digital Native* ini lebih terbuka untuk berbagi berbagai macam informasi.
9. Generasi *Digital Native* ini bersifat aktif, kreatif, dan inovatif.
10. Generasi *Digital Native* ini juga aktif melakukan *browsing* tetapi kurang mengenali sumber-sumber informasi yang didapat.
11. Generasi *Digital Native* ini adalah generasi yang bekerja di depan layar monitor.

Melihat karakteristik pemustaka yang berasal dari *Digital Native* di atas, mau tidak mau pustakawan perlu mengambil sikap untuk melakukan penyesuaian dan bahkan perubahan-perubahan untuk dapat menyajikan pelayanan prima⁵ kepada pemustakanya. Dan hal ini tidak mudah.

Pustakawan⁶ seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007, harus dapat menyesuaikan diri atau bahkan berubah untuk menjawab tantangan abad informasi ini. Perubahan dan penyesuaian kompetensi pustakawan akan menciptakan berbagai hasil perubahan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan image pustakawan menjadi lebih baik. Perubahan-perubahan yang bisa harus dilakukan oleh pustakawan antara lain adalah :⁷

1. Perubahan dari budaya lisan menjadi budaya baca dan tulis (*oral to read/write*).

⁵Pelayanan prima adalah pelayanan dengan jaminan mutu, keandalan, kompetensi, kebaruan informasi. Lasa HS di dalam "Layanan Prima Perpustakaan.Pdf," hal. 8 accessed July 11, 2017, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6375/Layanan%20Prima%20Perpustakaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁶ Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, "UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.Pdf," 1.

⁷ Endang Fatmawati, "Transformasi Peran Pustakawan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Yang Humanis" (Perpustakaan IAIN Surakarta, 2013), 41.

2. Perubahan dari perpustakaan yang berbasis sumberdaya fisik menjadi perpustakaan yang berbasis pengetahuan (*tangible to intangible*).
3. Perubahan orientasi pengadaan bahan pustaka dari koleksi fisik ke koleksi elektronik, sehingga akses informasi pemustaka terhadap informasi semakin cepat (*collection to access*).
4. Perubahan cara berpikir untuk perpustakaan sendiri menjadi berkolaborasi (menjalin kerjasama) dan membangun jaringan antar perpustakaan (*individual to group and networking*).
5. Perubahan bahan perpustakaan yang semula berbentuk kertas menjadi tanpa kertas (*paper to paperless*).
6. Perubahan dari perpustakaan yang bernilai fisik menjadi bernilai maya (*physical value chain to virtual*).
7. Perubahan paradigma dari ahli kepustakawanan saja menjadi ahli interdisipliner yang menguasai multidisiplin ilmu (*librarianship to interdisciplinary multistudies*).

Layanan perpustakaan yang prima menuntut kualitas pustakawan untuk memiliki beberapa faktor yang telah diuraikan di atas. Karena itu diperlukan kualitas dan kompetensi pustakawan yang mampu masuk dalam era pemustaka yang semakin modern serta memiliki cara tersendiri dalam mengakses sumber informasi. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kemajuan TIK turut pula merubah cara kerja dan performa perpustakaan perguruan tinggi sebagai penunjang dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Peningkatan kemampuan dan profesionalitas pustakawan hendaknya menjadi suatu prioritas di dalam pengembangan perpustakaan. Peningkatan profesionalitas pustakawan hendaknya dilakukan secara terus menerus seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Karena sifatnya yang terus menerus, maka kegiatan pengembangan ini dikenal dengan istilah *continuing professional development* (CPD). Breen menyatakan bahwa *Continuing Professional Development as a strategy to build strong libraries and library*

associations.⁸ Upaya CPD yang dapat ditempuh oleh pustakawan adalah dengan melanjutkan studi di bidang perpustakaan, mempelajari berbagai perkembangan perpustakaan serta teknologinya melalui kegiatan seminar, konferensi, dan/atau pelatihan, mengikuti kegiatan komunitas perpustakaan, menulis artikel, jurnal, dan buku, serta membangun jejaring melalui media sosial.⁹

C. Akreditasi Perguruan Tinggi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sebuah perpustakaan saat ini *bahkan* menjadi salah satu tolok ukur akreditasi lembaga (Perguruan Tinggi) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Karena pengelolaan informasi dan pemanfaatan informasi yang seluas-luasnya (tidak terbatas pada masyarakat akademik suatu perguruan tinggi saja) telah menjadi salah satu bentuk pertimbangan nilai (*value*) urgensi sebuah perpustakaan perguruan tinggi.

Adapun standarisasi perpustakaan perguruan tinggi yang menjadi salah satu syarat akreditasi lembaga adalah sebagai berikut¹⁰ :

- **Standar 2;** Kebijakan Pengembangan Koleksi perpustakaan (*collection Development Policy*). Kebijakan pengembangan koleksi yang bagus dan diterapkan secara konsisten akan menghasilkan bangunan koleksi yang kuat dan berkualitas (*high quality resource*).

Pengembangan koleksi tersebut tentu harus menyentuh kebutuhan dasar informasi pemustaka (*user*). Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar informasi tersebut, ada tehnik-tehnik pemerolehan (akuisisi) bahan pustaka

⁸ Eileen Breen, "IFLA -- How CPD Can Help Libraries and Librarianship Become Stronger," accessed July 11, 2017, <https://www.ifla.org/news/how-cpd-can-help-libraries-and-librarianship-become-stronger>.

⁹ Mufid Mufid and Ari Zuntriana, "Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development) Di Kalangan Pustakawan: Studi Analisis Deskriptif Pada Pustakawan Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Malang," 2015, 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/id/eprint/476>.

¹⁰ Faizuddin Harliansyah, *Peran Pustakawan dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi*, dipresentasikan pada "Semiloka Kepustakawanan Indonesia 2016 FPPTI", 12-14 Oktober 2016 di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

yang harus dikuasai dan diterapkan pihak perpustakaan. Kebutuhan primer bahan pustaka adalah kebutuhan buku-buku atau sumber informasi yang menjadi bahan ajar dan belajar, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum Perguruan Tinggi. Kebutuhan sekunder bahan pustaka adalah bahan pustaka yang bersifat di luar kebutuhan dasar tetapi juga dibutuhkan oleh pemustaka, seperti bahan pustaka yang bersifat rekreasi (misalnya karya-karya fiksi). Akuisisi bahan-bahan pustaka tersebut adalah tanggung jawab pengelola perpustakaan, dan pemenuhan kebutuhan informasi adalah hak pemustaka. Karena itu pemerolehan bahan pustaka yang bervariasi, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serial, koleksi khusus, baik dalam bentuk tercetak maupun digital, serta menyentuh kebutuhan dasar (primer) serta sekunder pemustaka menjadi standarisasi penilaian akreditasi lembaga oleh BAN-PT.

- Standar 5; Kebijakan Literasi Informasi (*Information Literacy Policy and Framework*).

Information Literacy is a set of abilities requiring individuals to “recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information”.¹¹

Dari *definisi* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Literasi Informasi yang dimiliki oleh perpustakaan dapat menjadi jasa yang sangat bermanfaat bagi pemustaka. Kegiatan Literasi Informasi adalah fungsi strategis yang dimiliki oleh pustakawan dalam usaha untuk mencerdaskan pemustaka dalam memanfaatkan berbagai macam informasi yang ada di perpustakaan. Dan karena ketersediaan informasi tidak hanya ada dan dapat diperoleh di perpustakaan, literasi informasi adalah *skill* yang sangat diperlukan dalam memilih, menganalisa, dan mengevaluasi informasi tersebut.

¹¹The Association of College and Research Libraries, “Information Literacy Competency Standards for higher Education”, Chicago, 2000, hlm. 2

Karena *itu* kebijakan literasi informasi yang ada di perpustakaan dijadikan salah satu pertimbangan akreditasi lembaga Perguruan Tinggi. Terlebih kebijakan penyelenggaraan program pengembangan *information literacy skills* yang bagus di perpustakaan untuk civitas akademika dapat berkontribusi positif pada penciptaan atmosfir dan suasana akademik yang kondusif.

- Standar 7; Pengembangan infrastruktur untuk mengelola *research output* (*repository*).

Research output Perguruan tinggi yang dikumpulkan, dan dikelola di perpustakaan adalah salah satu sumber informasi akademik yang potensial di sebuah perguruan tinggi. Karena *research output* tersebut adalah bukti nyata hasil intelektual dosen dan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. *Research output* yang berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, berbagai tulisan ilmiah, pidato, bahan ajar, dan sebagainya disimpan dan di-publish di sebuah repository perguruan tinggi. Repository tersebut biasanya dikelola oleh perpustakaan.

Karena itu wajar jika pengembangan infrastruktur dalam pengelolaan *research output* lembaga menjadi tolok ukur penilaian akreditasi lembaga perguruan tinggi. Selain itu kebijakan tata kelola dan diseminasi hasil-hasil riset dan karya ilmiah tersebut sejalan dengan semangat menjaga *scholarly communication yang sustainable dan open acces*. Hal ini merupakan refleksi dari komitmen suatu perguruan tinggi dalam pengembangan dan penyebar-luasan ilmu pengetahuan. Dengan CPD, pustakawan dapat memelihara dan mengembangkan kompetensi dalam bekerja, menjadi kompetitif dalam persaingan di lapangan kerja, dan menunjukkan komitmen pribadi pada tugas yang akan datang.

D. Continuing Professional Development (CPD) di UPT Pusat Perpustakaan UIN Mataram

Perpustakaan UIN Mataram menyadari sepenuhnya peran penting pustakawan di dalam penyelenggaraan perpustakaan, pelayanan, serta pengembangannya. Untuk dapat berkembang dengan dinamis sejalan dengan perkembangan institusi, perpustakaan sangat membutuhkan pegawai yang profesional, berkomitmen dalam menjalankan tugasnya, serta memiliki sikap kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan di dalam pekerjaannya. Untuk itu perpustakaan UIN Mataram harus mempunyai program penguatan dan pengembangan keterampilan untuk dapat meng-*up date* pengetahuan para pegawai perpustakaan. Program Penguatan dan pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh perpustakaan UIN Mataram adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi Pustakawan

Pada tahun 2015, melalui anggaran APBN, Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB melaksanakan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) di Mataram. Pada kegiatan tersebut, UIN Mataram berhasil memaksimalkan pengiriman utusan (pegawai perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan strata 1 non Perpustakaan) sebanyak 6 orang. Kegiatan dilakukan dari tanggal 11 Agustus s.d 28 Oktober 2015. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016, ke enam pegawai perpustakaan resmi diangkat kedalam jabatan Pustakawan Pertama. Pengangkatan pegawai ke dalam jabatan pustakawan meningkatkan jumlah pustakawan UIN Mataram dari 4 orang menjadi 10 orang.

2. Sertifikasi (Asesmen) Pustakawan

Setelah eksis dengan ke 10 orang pustakawannya, pada tahun 2016, perpustakaan UIN Mataram mengadakan kegiatan Sertifikasi (asesmen) untuk pustakawannya. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan akan kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan akademik, khususnya pustakawan UIN Mataram.

Namun pengakuan tersebut juga hendaknya diikuti dengan peningkatan kualitas profesionalisme pustakawan serta pengakuan bahwa profesi pustakawan memiliki daya saing, khususnya di dalam era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Untuk itu, sertifikasi (yang merupakan bukti dari pengakuan) profesi menjadi suatu keharusan bagi profesi pustakawan. Dengan Sertifikasi, pustakawan akan mendapatkan pengakuan profesi yang juga berdampak positif pada pengembangan karir dan pangkat profesinya.

Institusi (lembaga) yang bertugas memberikan sertifikasi kepada pustakawan di Indonesia adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. LSP Pustakawan ini berada di Perpustakaan Nasional RI. Institusi ini bersifat independen dan telah memperoleh izin (lisensi) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP Pustakawan inilah yang bertugas sebagai penyelenggara sertifikasi untuk pustakawan secara Nasional. Selain memberikan izin (lisensi) kepada LSP Pustakawan, BNSP juga melakukan *surveillance* terhadap kinerja LSP selama setahun sekali.

Kegiatan sertifikasi untuk pustakawan dilakukan secara sistematis dan objektif melalui kegiatan asesmen. Sistematis berarti proses kegiatan sertifikasi pustakawan dilakukan berdasarkan prosedur, metode, dan sumber daya. Sementara objektif berarti kegiatan sertifikasi pustakawan dilakukan berdasarkan Standard Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan.

Kompetensi Pustakawan yang diuji oleh LSP Pustakawan saat proses (kegiatan) sertifikasi berlangsung merupakan gabungan dari unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saat bekerja, kompetensi dimaknai sebagai kemampuan yang bisa dipraktikkan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan jabatan/pekerjaan di dalam tugas seorang pustakawan secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang pustakawan akan dinyatakan

kompeten bila di dalam proses sertifikasi terbukti telah memenuhi unsur-unsur di atas.

Proses sertifikasi (asesmen) pustakawan mengacu kepada kompetensi yang menjadi Komponen SKKNI Bidang Perpustakaan. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan karena kompetensi ini dibutuhkan pustakawan dalam melakukan tugas-tugasnya di perpustakaan. Kompetensi inti adalah kompetensi yang bersifat fungsional yang juga harus dimiliki oleh setiap pustakawan saat menjalankan tugasnya sehari-hari di perpustakaan. Dan kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat lebih spesifik serta berfungsi dalam peningkatan aktualisasi diri pustakawan.

Orang yang melakukan proses asesmen terhadap pustakawan disebut asesor kompetensi. Asesor tersebut terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi yang relevan serta memenuhi berbagai macam persyaratan. Asesor diangkat oleh LSP dalam jangka waktu tertentu. Asesor bertugas meng-ases kompetensi asesi (pustakawan yang diuji) berdasarkan ketentuan yang berlaku di LSP Pustakawan.

Proses asesmen dilakukan berdasarkan kelompok (klaster) yang dipilih oleh pustakawan. Ada 5 jenis kelompok yang bisa dipilih oleh seorang pustakawan sesuai dengan pekerjaannya. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok pengembangan koleksi, kelompok pengolahan bahan perpustakaan, kelompok layanan perpustakaan, kelompok pemasyarakatan perpustakaan, dan kelompok pelestarian bahan perpustakaan.¹²

Setelah asesmen dilakukan, maka diadakan sidang pleno untuk menentukan status pustakawan ke dalam kategori kompeten atau belum kompeten. Untuk menjaga objektivitas keputusan, maka asesor tidak

¹² Hendra Setiawan, "Sistem Sertifikasi Profesi Nasional," accessed July 12, 2017, <http://pustakawan.perpusnas.go.id/content/sistem-sertifikasi-profesi>.

diizinkan untuk ikut di dalam penentuan keputusan. Pustakawan yang lulus di dalam proses asesmen berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi Pustakawan. Sertifikat tersebut adalah pengakuan atas penguasaan kompetensi seorang pustakawan pada bidang tertentu. Sertifikat tersebut selanjutnya diterbitkan oleh BNSP dan hanya berlaku selama 3 tahun.

Untuk menjaga kompetensi pustakawan di tempat kerja, LSP melakukan surveillance setahun sekali dengan berbagai metode. Tujuan surveillance adalah untuk mengetahui dan memantau ketepatan dan kesesuaian pemegang sertifikat kompetensi dengan pelaksanaan tugas di instansi.

Kegiatan sertifikasi pustakawan pada Perpustakaan UIN Mataram dilakukan ke dalam 2 tahap kegiatan, yaitu :

- a) Tahap persiapan; berupa Kegiatan Pengayaan Asesmen Pustakawan yang dilakukan di UPT. Perpustakaan Universitas Mataram pada tanggal 11 s.d 13 Agustus 2016.

Kegiatan pada tahap persiapan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para pustakawan untuk menghadapi proses asesmen yang akan dilakukan oleh para asesor dari LSP Perpustakaan Nasional, mengingat keterampilan dan kemampuan para pustakawan tidaklah seragam. Narasumber yang dilibatkan adalah Pustakawan Madya dari Perpustakaan Universitas Mataram (UNRAM) yang telah mengikuti proses sertifikasi sebelumnya sehingga dipandang mampu untuk membagi pengalaman kepada pustakawan UIN Mataram yang akan mengalami proses sertifikasi. Materi yang diberikan berupa simulasi pelaksanaan asesmen yang akan dihadapi oleh para pustakawan, meliputi :

- ✓ kompetensi dasar (kemampuan komputer dasar, perencanaan, dan pelaporan kegiatan),
- ✓ kompetensi inti, yang disesuaikan dengan klaster (kelompok) kompetensi yang dipilih masing-masing pustakawan.

- b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan asesmen yang dilakukan di Hotel Lombok Raya, Jl. Panca Usaha No. 11 Mataram pada tanggal 27 s.d 29 September 2016.

Kegiatan asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perpustakaan Nasional RI dilakukan di Hotel Lombok Raya, Jl. Panca Usaha No. 11 Mataram. Tim asesor yang didatangkan dari LSP Perpustakaan Nasional RI sebanyak 5 orang.

Ada 4 klaster kompetensi yang dipilih oleh pustakawan UIN Mataram, yaitu klaster layanan perpustakaan (4 orang), klaster pengolahan bahan perpustakaan (3 orang), klaster pelayan masyarakat perpustakaan (2 orang), dan klaster pengembangan koleksi (1 orang). Dari pelaksanaan kegiatan asesmen, 8 orang pustakawan dinyatakan kompeten dan 2 orang pustakawan (dari klaster layanan perpustakaan) dinyatakan tidak kompeten.

Pengembangan profesionalisme diri pustakawan yang telah melalui proses sertifikasi dapat dilakukan secara mandiri oleh pustakawan. Pustakawan yang telah mendapatkan sertifikat dapat mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi. Pengakuan kompetensi oleh lembaga resmi akan meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pustakawan, sehingga pustakawan dapat meningkatkan potensi dan prestasi mereka. Peningkatan motivasi dan prestasi pustakawan tentu akan berpengaruh positif juga dalam mengangkat citra dan nama baik lembaga.

3. Literasi Informasi

Pada tahun 2017, UPT Pusat Perpustakaan memfokuskan pada kegiatan peningkatan **soft skill** pustakawannya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan PTKIN khususnya UIN Mataram pada bidang Literasi Informasi adalah suatu tuntutan jika pustakawan ingin meneguhkan peranannya di dalam *scholarly communication* (komunikasi akademi). Melalui kemampuan Literasi Informasi, pustakawan dapat

menjadi *guide* (pembimbing) bagi mahasiswa dalam mencari informasi yang relevan untuk menyelesaikan skripsi ataupun tugas kuliahnya.

Istilah Literasi Informasi muncul sekitar tahun 1990an sebagai penyempurnaan konsep *bibliographic instruction*, *library skills training*, *library instruction*, *library orientation*, *library skill training*, *library instruction*, *library orientation*, dan *user education* di era 1980an yang dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan.¹³

Model Literasi Informasi yang terkenal ada 2 macam, yaitu :

- a) Model yang diperkenalkan oleh *Association of College and Research Libraries* (ACRL) di Chicago pada tahun 2000.

ACRL mendefinisikan *Information Literacy* sebagai berikut :

“Information literacy is a set of abilities requiring individuals to “recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information”.

Model ini memuat 5 standar yang menandakan individu tersebut memiliki kemampuan literasi informasi. Setiap standar terdiri dari beberapa *performance indicators* yang masing-masing memuat beberapa poin yg diharapkan menjadi *outcomes*.

5 standar tersebut adalah :

- ✓ Standar 1 – Mahasiswa yang *information literate* mampu mengenali informasi yang dibutuhkan.
- ✓ Standar 2 - Mahasiswa yang *information literate* mampu mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif & efisien
- ✓ Standar 3 - Mahasiswa yang *information literate* mampu mengevaluasi informasi dan sumber-sumber informasi secara kritis, dan mampu menggabungkan informasi tertentu ke dalam pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki.
- ✓ Standar 4 - Mahasiswa yang *information literate*, secara individu dan kelompok, mampu memanfaatkan informasi secara efektif

¹³ Faizuddin Harliansyah, “Pengembangan Kurikulum Information Literacy Di Perguruan Tinggi (Best Practice Dari Beberapa Negara Maju)” (Al-Maktabah Vol. 14 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 31-32, <http://repository.uin-malang.ac.id/615/1/1662.pdf>.

untuk mencapai tujuan tertentu.

- ✓ Standar 5 - Mahasiswa yang *information literate* mampu memahami aspek ekonomi, hukum, dan sosial dalam pemanfaatan suatu informasi dan mampu mengakses dan menggunakan informasi secara etis dan legal.

b) Model yang diusung oleh *Society of College, National and University Libraries* (SCONUL) di tahun 2011.

SCONUL mendefinisikan *Information Literacy* sebagai berikut :

“Information literacy is an umbrella term which encompasses concepts such as digital, visual, and media literacies, academic literacy, information handling, information skills, data curation and data management”.

Model ini menjabarkan 7 prinsip yang harus ada di dalam kemampuan Literasi Informasi. Ketujuh prinsip tersebut adalah : Identify, Scope, Plan, Gather, Evaluate, Manage, dan Present.

Di dalam kemampuan tersebut, mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk mengenali jenis informasi apa yang dibutuhkan, jenis-jenis informasi ilmiah berdasarkan sumbernya, jenis-jenis publikasi berdasarkan format penyajian, jurna-jurnal ilmiah, sumber informasi ilmiah online, strategi penelusuran ilmiah, citation database, mengevaluasi jenis informasi, sumber, dan kualitas jurnal, mengatur informasi (strategi dan tahapan), serta mempresentasikan informasi tersebut ke dalam tulisan ilmiah. Tentu saja ada kemampuan menggunakan software untuk referencing style.

Kemampuan-kemampuan ini yang akan diperkenalkan kepada staf perpustakaan secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan perpustakaan yang berkesinambungan. Penguasaan kemampuan tersebut akan menjadi modal petugas perpustakaan dalam memberikan bimbingan penelusuran ilmiah kepada civitas akademika. Lebih lanjut diharapkan agar petugas perpustakaan dapat *exist* dalam membimbing penulisan karya ilmiah khusus kepada mahasiswa yang

membutuhkannya. Dan dapat berperan aktif dalam menekan jumlah angka plagiasi di dalam karya ilmiah civitas akademika UIN Mataram.

4. *Online Research Skill (ORS) untuk Academic Writing*

Kegiatan Workshop ini adalah kelanjutan dari kegiatan Training Literasi Informasi yang dilaksanakan sebelumnya. Setelah para staf perpustakaan mendapatkan rangkaian *Training* mengenai Literasi Informasi, *Academic Writing*, dan *Online Research Skill*, maka di kegiatan workshop ini para staf perpustakaan akan diperkenalkan dengan strategi dan tehnik menyampaikan pengetahuan tersebut kepada mahasiswa.

Kegiatan ini akan dikemas sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta workshop untuk memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh pada saat Training di kegiatan Workshop. Untuk itu, perpustakaan UIN Mataram mendatangkan 2 orang Narasumber yang merupakan praktisi di bidang ORS dari IAIN Jember dan IAIN Salatiga.

Dengan kegiatan ini, diharapkan agar para peserta workshop yang juga peserta Training Literasi Informasi dapat mematangkan ilmunya dan mengemasnya ke dalam strategi-strategi penyampaian materi –materi ORS untuk mahasiswa (*user*).

E. Rencana Proses CPD Pustakawan UIN Mataram

Kegiatan peningkatan kemampuan dan profesionalitas pustakawan UIN Mataram di atas tentu saja tidak serta merta dapat meningkatkan profesionalitas pustakawan secara *an sich*. Perlu suatu pembuktian dan pematangan kemampuan serta kompetensi yang diperoleh melalui proses pelatihan secara terus menerus. Dan motivasi pustakawan untuk terus menerus melatih diri serta meningkatkan potensi diri harus tetap distimulus oleh program-program kerja perpustakaan dengan atau tanpa biaya dukungan dana dari DIPA.

Masih banyak *soft skill* yang harus dikuasai oleh pustakawan UIN Mataram untuk dapat eksis di dalam kehidupan akademik Perguruan Tinggi. Program-program yang menjadi prioritas di dalam program kerja Perpustakaan UIN Mataram untuk peningkatan kualitas kerja pustakawan, antara lain adalah :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan di dalam dunia tulis menulis, serta meneguhkan peran pustakawan di dalam *scholarly communication* UIN Mataram.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan di dalam preservasi dan konservasi bahan pustaka.
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan untuk mengelola website dan media sosial dalam rangka promosi perpustakaan.
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan untuk akuisisi dan mengelola bahan pustaka yang mengandung *local wisdom* Provinsi NTB, khususnya menyangkut kebudayaan suku Sasak (Lombok), Samawa (Sumbawa), dan Mbojo (Bima).
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan dalam pengelolaan *repository* UIN Mataram
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan dalam menangani copyright suatu karya ilmiah serta maraknya plagiarisme di dunia akademik, khususnya UIN Mataram dalam rangka penguatan status perpustakaan untuk menjadi Perpustakaan Riset.
7. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan sesama perpustakaan perguruan tinggi di provinsi NTB khususnya, dan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.

F. Penutup (Kesimpulan dan saran)

Upaya – upaya di atas tentu saja membutuhkan dukungan dari pembuat kebijakan, seperti Rektor, Wakil Rektor, dan yang lainnya. Perpustakaan UIN Mataram menyadari sepenuhnya bahwa proses CPD yang dilakukan oleh pustakawan, harus dilakukan dengan *step by step*. Penetapan

prioritas kegiatan akan diselaraskan dengan dinamika perkembangan institusi. Sehingga pustakawan dapat eksis dan memainkan peranannya di dalam dunia akademik dimana fungsi dan peranannya dapat disejajarkan dengan fungsi dan peranan tenaga pendidik (dosen).

Memahami *best practice* tentang program *Continuing Professional Development* yang diterapkan oleh perpustakaan-perpustakaan serta pustakawan di Institusi / Perguruan Tinggi lain akan menjadi catatan positif bagi program pengembangan perpustakaan UIN Mataram ke depannya. Dinamika serta proses CPD yang dijalankan, kendala, serta solusi yang dilakukan dapat menjadi sumber inspirasi bagi perumusan program kerja di tahun-tahun berikutnya. Karena itu diperlukan program-program seperti magang, pelatihan, atau kunjungan (Studi banding) ke Perpustakaan Perguruan Tinggi yang lebih mapan.

Daftar Pustaka

- Breen, Eileen. "IFLA -- How CPD Can Help Libraries and Librarianship Become Stronger." Accessed July 11, 2017. <https://www.ifla.org/news/how-cpd-can-help-libraries-and-librarianship-become-stronger>.
- Fatmawati, Endang. "Transformasi Peran Pustakawan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Yang Humanis." Perpustakaan IAIN Surakarta, 2013.
- Habre, Cendrel. "Impact of Digital Natives on Libraries." University Librarian at Lebanese American University, n.d. <http://www.slideshare.net/Cendrella1/impact-of-digital-natives-on-libraries>.
- Harliansyah, Faizuddin. "Pengembangan Kurikulum Information Literacy Di Perguruan Tinggi (Best Practice Dari Beberapa Negara Maju)." Al-Maktabah Vol. 14 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/615/1/1662.pdf>.
- Haryanto, Haryanto. "Peran Baru Pustakawan Dalam Implementasi Serta Penguasaan Teknologi Informasi Di Perpustakaan." *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 10, no. 1 (n.d.): 17–21.
- Lasa, HS., "Layanan Prima Perpustakaan", Accessed July 11, 2017. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6375/Layanan%20Prima%20Perpustakaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mufid, Mufid, and Ari Zuntriana. "Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development) Di Kalangan Pustakawan: Studi Analisis Deskriptif Pada Pustakawan Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Malang," 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/id/eprint/476>.
- Purnomo, Wahyu. "Pembelajaran Berbasis ICT." *Dapat Diakses Di Http://Wahyupur.Files.Wordpress.Com200808makalah_pembelajaranberbasi Sict. Pdf [Diakses 8/1/2011]*, 2008. <http://physicsmaster.orgfree.com/Artikel%20&%20Jurnal/Inovasi%20Dalam%20Pendidikan/pembelajaran%20berbasis%20ICT-2.pdf>.
- Setiawan, Hendra. "Sistem Sertifikasi Profesi Nasional." Accessed July 12, 2017. <http://pustakawan.perpusnas.go.id/content/sistem-sertifikasi-profesi>.
- UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.Pdf." Accessed July 11, 2017. http://htl.unhas.ac.id/form_peraturan/photo/094607-UU%20No.43%20tahun%202007%20tentang%20Perpustakaan.pdf.